

Komunikasi Inklusif dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Roemah Difabel Indonesia

Natalia Sari Pujiastuti¹, Suhariyanto¹, Agus Edy Laksono¹, Viro Dharma Saputra¹

¹Universitas Semarang, Indonesia

ABSTRACT

This study examines how inclusive communication operates within community based disability empowerment. Specifically, it explores how communication adaptation supports access to participation and relates to role changes among members at Roemah Difabel Indonesia in Semarang, Central Java. Employing a qualitative intrinsic case study approach, data was primarily collected through complete interviews with five key informants deeply involved in organizational management, facilitation, mentoring, and community activities. These interviews, supported by participant observation and organizational documentation, were analyzed thematically. The findings reveal that inclusive communication is effectively practiced through simplified language, repeated explanations, written and visual information, direct demonstrations, gestures, sign language, digital media, and tailored mentoring. These specific adaptations helped members understand information clearly and participate actively in learning, community, and productive activities. Empirical evidence shows a distinct contextual pattern where communication adaptation is strongly associated with expanded participation, increased opportunities to use acquired skills, and greater responsibility for several members. The study concludes that disability empowerment programs must integrate communication accessibility with meaningful participation and pathways for members to assume appropriate social roles. While limited by a single case focus and the lack of longitudinal assessment, the findings strongly recommend future comparative studies.

 OPEN ACCESS

ARTICLE HISTORY

Received: 29-07-2025

Revised: 16-08-2025

Accepted: 16-08-2025

KEYWORDS

inclusive
communication,
disability
empowerment,
community
participation, role
transformation

Corresponding Author:

Natalia Sari Pujiastuti

Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Teknologi Informasi dan Ilmu Komunikasi

Universitas Semarang, Indonesia

Email: natalia@usm.ac.id

Pendahuluan

Pemberdayaan penyandang disabilitas tidak cukup dipahami sebagai penyediaan bantuan, layanan sosial, atau pelatihan keterampilan. Pemberdayaan juga berkaitan dengan kesempatan untuk mengakses informasi, mengembangkan kapasitas, menyampaikan pendapat, mengambil tanggung jawab, dan menjalankan peran yang bermakna dalam kehidupan sosial. Perspektif berbasis hak menempatkan penyandang disabilitas sebagai subjek yang memiliki kapasitas, pilihan, dan hak untuk berpartisipasi. Dalam konteks Indonesia, Abdillah et al. (2025) menunjukkan bahwa hambatan terhadap inklusi tidak hanya berkaitan dengan kondisi individu, tetapi juga dengan keterbatasan aksesibilitas, fasilitas publik, lingkungan sosial, serta kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan.

Tantangan tersebut juga berkaitan dengan akses terhadap informasi dan layanan yang aksesibel. Kajian terbaru mengenai perlindungan sosial inklusif di Indonesia menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam cakupan, aksesibilitas, dan kecukupan layanan, sekaligus menegaskan pentingnya keterlibatan organisasi penyandang disabilitas dalam pengembangan sistem yang lebih inklusif (Center for Inclusive Policy, & Inclusion Advisory Group, 2025). Perspektif tersebut sejalan dengan UNICEF (2023), yang menekankan pentingnya lingkungan yang mendukung partisipasi, komunikasi yang aksesibel, serta keterlibatan organisasi dan jaringan masyarakat sipil dalam proses inklusi.

Dalam konteks Roemah Difabel Indonesia di Semarang, kebutuhan terhadap akses komunikasi juga masih ditemukan. Anggota memiliki kebutuhan komunikasi yang beragam sehingga informasi tidak selalu dapat disampaikan melalui satu bentuk komunikasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa program pemberdayaan perlu disertai lingkungan komunikasi yang aksesibel dan ruang partisipasi yang memungkinkan anggota memahami informasi, memberikan respons, dan terlibat dalam kegiatan komunitas.

Organisasi dan komunitas lokal memiliki posisi penting dalam proses tersebut. Organisasi nonpemerintah dapat mendukung pemberdayaan melalui pembangunan kapasitas, partisipasi, dan penguatan self-reliance (Nikkhah & Redzuan, 2010). Dalam konteks Indonesia, Ormas dan LSM berperan melalui pelatihan, fasilitasi, mobilisasi, penguatan partisipasi, dan pengembangan jejaring (Rahman et al., 2023). Langmann et al. (2024) menunjukkan bahwa kedekatan organisasi lokal dengan komunitas memungkinkan kebutuhan, sumber daya, dan hambatan anggota dipahami secara lebih kontekstual. Daroini et al. (2022) juga menunjukkan bahwa organisasi komunitas dapat memperkuat inklusi melalui peningkatan kesadaran, pelatihan kapasitas, pendampingan, dan pengembangan jaringan. Dalam organisasi berbasis komunitas, komunikasi berperan dalam membangun koordinasi dan membuka ruang partisipasi. Simanjuntak

dan Sunarja (2023) menunjukkan bahwa komunikasi organisasi lokal berlangsung melalui interaksi antar pengurus dan anggota yang mendukung penyampaian gagasan, koordinasi, dan hubungan dengan masyarakat.

Di dalam proses tersebut, komunikasi menjadi penting karena akses terhadap kegiatan bergantung pada kemampuan anggota untuk menerima, memahami, dan merespons informasi. Tomczak et al. (2021) menunjukkan bahwa komunikasi inklusif dapat didukung melalui kejelasan pesan, penggunaan komunikasi visual dan tertulis, dukungan pendamping, serta umpan balik yang disesuaikan dengan kebutuhan individu. Meskipun penelitian tersebut dilakukan pada individu dengan *autism spectrum disorders* dalam konteks ketenagakerjaan, relevansinya bagi penelitian ini terletak pada prinsip adaptasi komunikasi, bukan pada penerapan langsung model yang sama kepada seluruh ragam disabilitas.

Keragaman kebutuhan komunikasi juga terlihat dalam konteks Indonesia. Pudrianisa et al. (2024), menunjukkan bahwa hambatan akses informasi dan bentuk dukungan yang diperlukan tidak seragam pada komunitas tuli dan netra. Temuan tersebut menegaskan bahwa komunikasi inklusif lebih tepat dipahami sebagai proses adaptif yang mempertimbangkan kebutuhan penerima, bukan sebagai satu pola komunikasi yang berlaku sama bagi seluruh anggota.

Akses komunikasi menjadi lebih bermakna ketika diikuti kesempatan untuk berpartisipasi. Verdonshot et al. (2009) membedakan keberadaan seseorang dalam komunitas dari keterlibatan yang bermakna, sedangkan Bigby dan Wiesel (2011) menunjukkan bahwa *community presence* belum otomatis menghasilkan inklusi sosial. Partisipasi menjadi lebih substantif ketika anggota dapat menyampaikan pendapat, menggunakan keterampilan, mengambil tanggung jawab, dan berkontribusi dalam kehidupan komunitas. Perubahan peran penting karena menunjukkan bahwa kapasitas yang berkembang mulai digunakan dalam kehidupan komunitas. Widagdo et al. (2025) menunjukkan bahwa pelatihan adaptif, pembentukan peran sosial yang bermakna, dan keterlibatan dalam aktivitas sosial-ekonomi dapat mendukung inklusi dan pemberdayaan penyandang disabilitas.

Meskipun kajian terdahulu telah membahas komunikasi inklusif, partisipasi, pengembangan kapasitas, dan pemberdayaan, masih terbatas penelitian yang menjelaskan bagaimana komunikasi inklusif bekerja sebagai bagian dari proses pemberdayaan dalam organisasi komunitas lokal penyandang disabilitas, khususnya bagaimana adaptasi komunikasi membuka akses terhadap partisipasi dan berkaitan dengan perubahan peran anggota dari penerima program menuju keterlibatan yang lebih aktif. Kesenjangan ini penting karena kajian komunikasi inklusif lebih banyak menekankan aksesibilitas pesan, sedangkan kajian pemberdayaan berbasis komunitas

cenderung membahas kapasitas, partisipasi, dan kemandirian sebagai dimensi yang terpisah.

Roemah Difabel Indonesia di Kota Semarang memberikan konteks yang relevan untuk mengkaji persoalan tersebut. Komunitas ini menyelenggarakan kegiatan pengembangan keterampilan, pendampingan, aktivitas sosial, dan kegiatan produktif dengan praktik komunikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan anggota. Pada sebagian anggota, keterlibatan dalam kegiatan juga berkembang menjadi tanggung jawab yang lebih aktif dalam pembelajaran, pengelolaan kegiatan, aktivitas produktif, atau representasi komunitas.

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana komunikasi inklusif diterapkan dalam proses pemberdayaan di Roemah Difabel Indonesia serta bagaimana praktik tersebut berkaitan dengan partisipasi dan perubahan peran anggota. Secara konseptual, penelitian ini berkontribusi dengan menempatkan komunikasi inklusif sebagai penghubung antara akses komunikasi, partisipasi, dan perubahan peran dalam pemberdayaan berbasis komunitas. Secara empiris, penelitian ini menunjukkan bagaimana hubungan tersebut berlangsung dalam satu organisasi komunitas lokal penyandang disabilitas dengan kebutuhan komunikasi yang beragam. Kontribusi tersebut bersifat kontekstual dan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan secara universal.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus intrinsik untuk memahami praktik komunikasi inklusif dalam proses pemberdayaan penyandang disabilitas di Roemah Difabel Indonesia, Kota Semarang, Jawa Tengah. Desain ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman mendalam terhadap dinamika satu komunitas dalam konteks alaminya, bukan untuk merepresentasikan seluruh organisasi penyandang disabilitas. Roemah Difabel Indonesia mengintegrasikan pengembangan soft *skills*, pelatihan keterampilan, pendampingan, aktivitas sosial dan produktif, serta pelibatan anggota dalam kegiatan komunitas. Karakteristik tersebut memungkinkan praktik komunikasi dikaji dalam kaitannya dengan partisipasi, penggunaan keterampilan, dan perkembangan tanggung jawab anggota.

Pengumpulan data berlangsung selama April–Juli 2025 melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Observasi lapangan dilakukan secara rutin setiap Jumat pukul 09.00–13.00 selama April–Juni 2025 di Roemah Difabel Indonesia. Pengamatan diarahkan pada proses penyampaian informasi, interaksi antara pengelola, mentor dan anggota, penggunaan media komunikasi, bentuk pendampingan, respons anggota, proses pembelajaran, serta keterlibatan dalam kegiatan komunitas. Posisi peneliti adalah participant-as-observer. Selain melakukan pengamatan, peneliti berpartisipasi dalam beberapa kegiatan, antara lain persiapan pelatihan bahasa isyarat

“Ruang Isyarat” di Universitas Semarang dan kegiatan bazar komunitas. Dalam kegiatan bazar, peneliti turut memberikan masukan mengenai kelayakan kualitas produk yang dipasarkan. Keterlibatan tersebut dipertimbangkan secara reflektif ketika menafsirkan hasil observasi dan membandingkannya dengan sumber data lain.

Informan dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan langsung, pengalaman, dan pengetahuan mengenai kegiatan Roemah Difabel Indonesia. Delapan informan mengikuti proses wawancara dan mewakili unsur pendiri atau pengelola, pengurus, mentor atau fasilitator, serta anggota penyandang disabilitas. Dari delapan informan tersebut, lima menyelesaikan seluruh rangkaian wawancara, sedangkan tiga lainnya tidak menyelesaikan seluruh pertanyaan karena keterbatasan waktu atau kesulitan mengikuti keseluruhan proses wawancara. Kelima wawancara lengkap menjadi dasar utama analisis karena menyediakan informasi yang memadai dan dapat ditelusuri secara konsisten. Karakteristik informan tersebut disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik Informan dengan Wawancara Lengkap

Kode	Peran	Latarbelakang dan Peran	Gabung di RD
F1	Founder	Pendiri, penggagas, penanggungjawab kegiatan (non difabel, orangtua difabel)	Sejak 2017
F2	Ketua Pelaksana Harian	Koordinasi kegiatan dan pendampingan (difabel fisik, psikolog, professional di HR)	±4 tahun
F3	Mentor Kelas Bahasa Inggris	Fasilitasi pembelajaran (relawan mahasiswa Sastra Inggris, non difabel)	Sejak 2024
F4	Anggota	Peserta kegiatan dan aktivitas komunitas (anggota difabilitas intelektual)	Sejak 2022
F5	Anggota, Salah Satu Pengelola Sosial Media	Kegiatan komunitas dan pengelolaan media/aktivitas produktif (anggota disabilitas ganda)	Sejak 2020

Sumber : Data Peneliti, 2026

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dan disesuaikan dengan posisi, pengalaman, serta kemampuan komunikasi informan. Pertanyaan mencakup pengalaman menerima dan menyampaikan informasi, kebutuhan dan hambatan komunikasi, bentuk adaptasi komunikasi, pengalaman mengikuti kegiatan, kesempatan memberikan respons dan berpartisipasi, penggunaan keterampilan, pengambilan tanggung jawab, serta perubahan keterlibatan dalam komunitas. Pada informan penyandang disabilitas, pertanyaan dapat disederhanakan, diulang, atau dijelaskan melalui contoh konkret sesuai kebutuhan komunikasi. Pendekatan ini digunakan agar proses wawancara tetap inklusif tanpa memaksakan bentuk pertanyaan yang sama kepada seluruh informan.

Studi dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan memeriksa konsistensi data wawancara dan observasi. Dokumen yang dianalisis meliputi profil organisasi, jadwal dan materi kegiatan, materi pembelajaran, publikasi media sosial, dokumentasi foto dan

video, serta dokumentasi aktivitas produktif dan pengembangan keterampilan. Wawancara digunakan untuk memahami pengalaman informan, observasi untuk melihat praktik komunikasi dan partisipasi dalam konteks kegiatan, sedangkan dokumentasi digunakan untuk mengonfirmasi konteks program dan keterlibatan anggota.

Data dianalisis menggunakan analisis tematik mengacu pada Braun dan Clarke (2006) melalui tahap familiarisasi data, pemberian kode awal, pengelompokan kode, pengembangan kategori dan tema sementara, pemeriksaan kembali tema terhadap data sumber, serta penetapan tema akhir. Coding difokuskan pada adaptasi komunikasi, akses dan partisipasi, penggunaan kapasitas, tanggung jawab, perubahan peran, serta proses menuju kemandirian. Keterlacakan analisis dijaga melalui matriks yang menghubungkan data sumber–kode awal–kategori–tema. Sebagai contoh, data mengenai pengulangan informasi dan penggunaan bahasa sederhana dikodekan sebagai pengulangan pesan dan penyederhanaan bahasa, kemudian dikelompokkan ke dalam kategori penyesuaian komunikasi dan tema adaptasi komunikasi.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan membandingkan informasi dari pengelola, pengurus, mentor, anggota, hasil observasi, dan dokumentasi. Seluruh proses penelitian juga memperhatikan etika penelitian kualitatif dan kebutuhan komunikasi partisipan penyandang disabilitas. Informan memperoleh penjelasan mengenai tujuan penelitian, penggunaan data, sifat sukarela partisipasi, serta hak untuk tidak menjawab atau menghentikan wawancara. Penyampaian informasi disesuaikan dengan kebutuhan komunikasi melalui bahasa sederhana, pengulangan, atau penjelasan tambahan. Identitas informan disamarkan menggunakan kode, sedangkan informasi mengenai ragam disabilitas hanya digunakan apabila relevan terhadap analisis dan tidak membuka identitas personal.

Hasil dan Diskusi

Analisis tematik terhadap wawancara, observasi, dan dokumentasi menghasilkan empat tema yang saling berkaitan, yaitu: (1) ruang pengembangan kapasitas dengan kebutuhan komunikasi yang beragam; (2) adaptasi komunikasi sebagai pembuka akses dan partisipasi; (3) perkembangan partisipasi menuju tanggung jawab dan perubahan peran; serta (4) penggunaan keterampilan dalam proses menuju kemandirian. Tema adaptasi komunikasi memperoleh dukungan dari kelima informan dengan wawancara lengkap (F1–F5), demikian pula tema partisipasi dan penggunaan keterampilan, meskipun bentuk pengalaman dan tingkat dukungan yang dibutuhkan berbeda antaranggota.

Perubahan peran ditemukan melalui pengalaman langsung anggota serta keterangan pengelola, pengurus, dan mentor mengenai anggota yang memperoleh tanggung jawab baru. Data wawancara tersebut diperiksa silang dengan dokumentasi organisasi mengenai program pembelajaran, struktur kegiatan, RD Shop, pengelolaan organisasi, dan akses kerja.

Dalam penyajian hasil, F1 merujuk pada pendiri/pengelola, F2 pada pengurus/koordinator harian, F3 pada mentor/fasilitator, sedangkan F4 dan F5 merupakan anggota penyandang disabilitas. Posisi informan tersebut penting karena memungkinkan fenomena komunikasi dibaca dari perspektif kebijakan organisasi, pelaksanaan pendampingan, dan pengalaman anggota secara langsung.

Tabel 2. Matriks Temuan Empiris Komunikasi Inklusif dalam Pemberdayaan

TEMA	KODE AWAL	SUMBER DATA	CONTOH BUKTI	INDIKATOR EMPIRIS
Pengembangan kapasitas dan kebutuhan komunikasi	Belajar melalui praktik; mentoring; pengulangan; perbedaan dukungan	F1–F5; dokumentasi program	Kelas keterampilan, public speaking, Bahasa Inggris, literasi digital, melukis, kegiatan produktif	Mengikuti kegiatan, mempraktikkan keterampilan, membutuhkan tingkat dukungan berbeda
Adaptasi komunikasi dan akses partisipasi	Penyederhanaan pesan; multimodalitas; demonstrasi; pengulangan; pendampingan	F1–F5; dokumentasi media/program	Penjelasan lisan dan tertulis, WA, visual, bahasa isyarat, praktik langsung	Memahami instruksi, bertanya, merespons, mengikuti kegiatan
Tanggung jawab dan perubahan peran	Pemberian kepercayaan; membantu kegiatan; fasilitasi; pengelolaan	F1–F5; dokumentasi organisasi/RD Shop	Anggota membantu kelas, mengelola konten, RD Shop, kegiatan komunitas	Tanggung jawab baru, kontribusi rutin, representasi atau pengelolaan kegiatan
Proses menuju kemandirian	Penggunaan keterampilan; aktivitas produktif; keberanian; dukungan berkelanjutan	F1–F5; dokumentasi aktivitas produktif dan kerja	Bazar, produksi, desain konten, kegiatan publik, akses kerja	Melakukan tugas lebih mandiri, menggunakan keterampilan, memperoleh penghasilan/akses kerja, tetap menerima dukungan sesuai kebutuhan

Sumber: Olahan peneliti berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1. Ruang Pengembangan Kapasitas dengan Kebutuhan Komunikasi yang Beragam

Roemah Difabel menyediakan lingkungan pembelajaran yang menggabungkan kegiatan pengembangan diri, keterampilan teknis, aktivitas produktif, dan interaksi sosial. Dokumentasi organisasi mencatat kegiatan baca-tulis-hitung, etika kerja, Bahasa Inggris, public speaking, literasi digital, komputer, menjahit dan menyulam, melukis, hidroponik, serta cooking class. Proses pembelajaran menggunakan *peer*

learning, learning by doing, pendekatan modular dan fleksibel, serta mentoring dan pendampingan personal.

Konteks tersebut penting karena anggota tidak memasuki proses pembelajaran dengan kemampuan komunikasi dan tingkat dukungan yang sama. F1 dan F2 sama-sama menegaskan bahwa informasi yang telah disampaikan belum tentu dipahami dengan cara yang sama oleh seluruh anggota. F1 menggambarkan perlunya menyampaikan pesan secara tertulis sekaligus lisan dan memeriksa kembali pemahaman, sedangkan F2 membedakan kelas mandiri dengan kelas pendampingan berdasarkan tingkat dukungan yang diperlukan.

"Harus berkali-kali. Sudah tertulis, juga diingatkan lagi secara lisan, dicek lagi... harus sabar dan dicek ulang." (F1)

F2 menjelaskan bahwa anggota pada kelas mandiri umumnya dapat menindaklanjuti instruksi dengan dukungan lebih sedikit, sedangkan anggota pada kelas pendampingan membutuhkan pengulangan, penyederhanaan informasi, dan pada situasi tertentu keterlibatan keluarga. Dengan demikian, kebutuhan komunikasi dalam komunitas tidak dapat dipahami hanya berdasarkan kategori disabilitas, tetapi juga melalui kemampuan aktual anggota dalam memahami informasi dan menjalankan kegiatan.

Temuan ini memberi konteks terhadap prinsip komunikasi inklusif yang dibahas Tomczak et al. (2021). Studi tersebut menunjukkan pentingnya kejelasan pesan, komunikasi tertulis dan visual, dukungan mentor, serta umpan balik yang disesuaikan. Karena konteks Tomczak et al. berfokus pada individu dengan spektrum autisme, temuan tersebut tidak digunakan untuk menyamakan kebutuhan antar-ragam disabilitas. Relevansinya pada kasus Roemah Difabel terletak pada prinsip adaptasi komunikasi, yakni bahwa lingkungan komunikasi perlu menyesuaikan cara penyampaian dan dukungan terhadap kebutuhan individu.

2. Adaptasi Komunikasi sebagai Pembuka Akses dan Partisipasi

Adaptasi komunikasi merupakan tema dengan dukungan empiris paling konsisten karena muncul dalam pengalaman seluruh informan F1–F5. Bentuk adaptasinya meliputi penyederhanaan bahasa, pengulangan, komunikasi tertulis, visual, demonstrasi langsung, gestur atau bahasa isyarat, komunikasi digital, serta bantuan pendamping atau anggota lain. Bentuk tersebut tidak digunakan sebagai paket yang sama untuk seluruh anggota, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi.

Pada tingkat organisasi, informasi kegiatan disampaikan antara lain melalui grup WhatsApp dan komunikasi tatap muka. F2 menjelaskan bahwa jadwal kegiatan dibagikan melalui grup anggota dan orang tua, tetapi anggota yang membutuhkan pendampingan tetap memerlukan penjelasan tambahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tersedianya

media digital belum otomatis berarti informasi telah dapat digunakan oleh seluruh penerima.

Adaptasi yang lebih spesifik terlihat pada pengalaman F3 ketika berkomunikasi dengan anggota tuli. F3 menggunakan bahasa isyarat sesuai kemampuannya dan, ketika komunikasi belum berjalan memadai, menggunakan tulisan atau penyampaian secara lebih perlahan. Informan sekaligus mengakui keterbatasan penguasaan bahasa isyarat sebagai hambatan yang masih perlu diperbaiki. Pada F4, penjelasan verbal yang belum dipahami dalam kegiatan melukis dilengkapi dengan demonstrasi langsung. Sementara itu, F5 menggambarkan proses belajar membuat konten melalui instruksi bertahap, praktik, evaluasi, dan koreksi berulang.

"Saya coba buat, saya serahkan hasilnya. Kalau ada yang salah, saya koreksi ulang... begitu terus, jadi sudah paham yang dimaksud untuk konten RD." (F5)

Bukti tersebut memperlihatkan mekanisme empiris pertama dalam proses pemberdayaan: informasi yang tersedia perlu diubah menjadi informasi yang dapat dipahami dan digunakan. Adaptasi komunikasi bukan hasil pemberdayaan itu sendiri, tetapi menyediakan kondisi agar anggota dapat memasuki kegiatan, memberi respons, bertanya, dan melakukan tugas.

Hubungan berikutnya terlihat pada partisipasi. F3 mengamati keterlibatan anggota dalam praktik dialog Bahasa Inggris; F4 mulai terlibat dalam aktivitas bazar dan berinteraksi dengan pengunjung; sedangkan F5 memperoleh kesempatan menjalankan tugas organisasi. Data tersebut tidak berarti komunikasi yang adaptif secara otomatis menghasilkan partisipasi. F2 justru menunjukkan bahwa pada anggota dengan kebutuhan pendampingan lebih tinggi, pengulangan masih belum selalu menghasilkan tingkat pemahaman yang sama. Adaptasi komunikasi dengan demikian lebih tepat dipahami sebagai kondisi yang memperbesar peluang partisipasi, bukan sebagai hubungan sebab-akibat tunggal. Temuan tersebut sejalan dengan Stafford et al. (2024), yang menunjukkan bahwa lingkungan komunitas yang inklusif memerlukan informasi dan bentuk komunikasi yang tersedia dalam beragam format agar dapat menjangkau kebutuhan partisipasi penyandang disabilitas yang berbeda.

Interpretasi ini juga sejalan dengan Balandin dan Duchan (2007) yang menempatkan kualitas lingkungan dan mitra komunikasi sebagai bagian dari akses menuju inklusi. Temuan Roemah Difabel menambahkan dimensi organisasional: akses komunikasi menjadi bermakna ketika setelah memahami pesan, anggota memperoleh ruang untuk bertindak dan terlibat.

3. Dari Partisipasi menuju Tanggung Jawab dan Perubahan Peran

Perubahan peran tidak hanya didasarkan pada satu atau dua kutipan. Kelima informan memberikan keterangan mengenai keberadaan anggota yang memperoleh

bentuk tanggung jawab lebih besar, walaupun tidak seluruhnya mengalami perubahan peran dengan intensitas yang sama. F1 dan F2 memberikan beberapa contoh anggota yang memperoleh tanggung jawab dalam aktivitas produktif, pengelolaan kegiatan, dan hubungan eksternal. F3 mengidentifikasi sedikitnya lima anggota yang dipercaya membantu pengajar atau mendampingi anggota lain dalam kegiatan pembelajaran; F3 juga menyebut keterlibatan anggota dalam representasi komunitas dan RD Shop.

Pada dua anggota yang diwawancarai secara langsung, bentuk perubahan tersebut berbeda. F4 tidak memiliki jabatan pengelolaan formal, tetapi mengalami perluasan keterlibatan dari aktivitas yang sebelumnya sangat terbatas menuju keikutsertaan dalam kegiatan, bazar, interaksi dengan pengunjung, dan membantu tugas tertentu. F5 memperlihatkan perubahan yang lebih terstruktur: dari anggota biasa menjadi pihak yang dipercaya membuat konten, kemudian menjalankan tanggung jawab pada media sosial dan RD Shop.

"Awal di RD saya hanya anggota biasa, kemudian saya perlahan-lahan mulai dipercaya untuk membuat konten. Awalnya sesekali, sekarang sudah pegang sosial media RD." (F5)

Dokumentasi organisasi mendukung adanya pengalihan tanggung jawab tersebut. Profil RD mencantumkan anggota penyandang disabilitas dalam fungsi organisasi, termasuk pengelolaan RD Shop, dan mendokumentasikan kegiatan yang menempatkan anggota sebagai bagian dari aktivitas produktif maupun representasi komunitas.

Berdasarkan bukti tersebut, istilah perubahan peran dalam penelitian ini tidak digunakan untuk setiap peningkatan aktivitas. Perubahan peran dibedakan melalui indikator berupa tanggung jawab yang relatif baru, penggunaan keterampilan untuk kepentingan kegiatan bersama, keterlibatan dalam pengelolaan atau fasilitasi, pendampingan anggota lain, atau representasi komunitas. Kepercayaan diri atau keberanian berkomunikasi saja belum dikategorikan sebagai perubahan peran apabila belum disertai perubahan pada bentuk keterlibatan atau tanggung jawab.

Temuan ini memperjelas perbedaan antara community presence dan partisipasi bermakna. Verdonschot et al. (2009) dan Bigby dan Wiesel (2011) mengingatkan bahwa kehadiran dalam komunitas belum otomatis berarti inklusi sosial. Dalam kasus Roemah Difabel, indikator yang lebih kuat justru terlihat ketika anggota tidak hanya hadir, tetapi menggunakan kemampuan untuk membantu, mengelola, mewakili, atau menjalankan tanggung jawab tertentu. Temuan tersebut juga sejalan dengan Thorn et al. (2009), yang menunjukkan pentingnya keterlibatan dalam aktivitas komunitas bagi peningkatan integrasi dan inklusi sosial penyandang disabilitas intelektual. Dalam konteks Roemah Difabel Indonesia, keterlibatan menjadi lebih substantif ketika anggota tidak hanya mengikuti kegiatan, tetapi mulai menggunakan kemampuan dan menjalankan tanggung jawab dalam kehidupan komunitas.

Keterkaitan empiris antara komunikasi dan perubahan peran karena itu berlangsung melalui beberapa proses, bukan satu lompatan langsung. Adaptasi komunikasi membantu pemahaman; pemahaman memungkinkan keterlibatan; keterlibatan memberi kesempatan untuk berlatih dan menggunakan kemampuan; pengalaman tersebut pada sebagian anggota diikuti pemberian kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar. Mekanisme ini merupakan pola yang ditemukan dalam kasus, bukan hukum kausal yang berlaku bagi seluruh penyandang disabilitas.

4. Penggunaan Keterampilan dan Proses Menuju Kemandirian

Data juga menunjukkan bahwa perubahan kepercayaan diri, partisipasi, tanggung jawab, dan kemandirian perlu dibedakan secara analitis. Dalam penelitian ini, kepercayaan diri ditandai oleh keberanian berbicara atau berinteraksi; partisipasi ditandai oleh keterlibatan dalam kegiatan dan pemberian respons; tanggung jawab ditandai oleh tugas yang dipercayakan dan dijalankan secara berulang; sedangkan kemandirian diamati melalui kemampuan menggunakan keterampilan atau melakukan aktivitas dengan bantuan yang berkurang, mengambil keputusan pada tingkat tertentu, menjalankan kegiatan produktif, atau memperoleh akses terhadap pekerjaan/penghasilan. Kemandirian tidak diartikan sebagai hilangnya seluruh kebutuhan terhadap dukungan.

F2 menjelaskan bahwa anggota mempraktikkan keterampilan melalui rangkaian kegiatan nyata, seperti hidroponik dari penanaman hingga penjualan serta pembuatan produk yang kemudian dipasarkan. F4 menggunakan keterampilan melukis dan terlibat dalam bazar, sedangkan F5 menggunakan kemampuan desain untuk kebutuhan komunikasi organisasi. Dokumentasi RD juga menunjukkan hubungan antara pelatihan, RD Shop, pemasaran produk, dan akses kerja. Profil tersebut bahkan mendokumentasikan anggota yang telah memperoleh kesempatan kerja di perusahaan dan lembaga lain.

Meski demikian, perkembangan tersebut tidak identik dengan kemandirian penuh. F4 masih membutuhkan pengawasan dan pendampingan pada situasi publik tertentu, sementara F5 tetap membutuhkan dukungan mobilitas dan pada beberapa tugas desain masih memerlukan arahan atau koreksi. Hal ini memperlihatkan bahwa kebutuhan terhadap dukungan dapat tetap hadir bersamaan dengan berkembangnya kemampuan dan tanggung jawab.

Temuan tersebut sejalan dengan Nikkhah dan Redzuan (2010), yang menempatkan *capacity building*, partisipasi, dan self-reliance sebagai proses yang saling berkaitan, serta Dushkova dan Ivlieva (2024), yang melihat pemberdayaan melalui kapasitas, tanggung jawab, partisipasi, kepemilikan, dan kemandirian. Hal tersebut juga sejalan dengan Surwanti dan Rahayu (2025), yang menempatkan pemberdayaan penyandang disabilitas sebagai proses perluasan kesempatan, keterampilan, kapasitas,

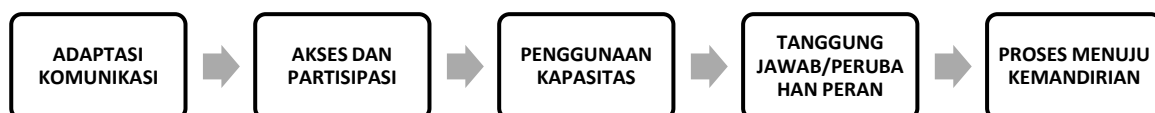
dan partisipasi untuk mendukung kemandirian. Penggunaan keterampilan dalam situasi nyata juga menunjukkan bahwa nilai pelatihan tidak berhenti pada penguasaan kemampuan teknis. Bartram dan Cavanagh (2019) menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan vokasional dalam membuka kesempatan yang lebih luas bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam aktivitas kerja. Pada kasus Roemah Difabel Indonesia, relevansi tersebut terlihat ketika keterampilan digunakan dalam kegiatan produktif, pengelolaan media, bazar, maupun akses terhadap pekerjaan.

Dalam kasus Roemah Difabel, keterampilan memperoleh makna pemberdayaan bukan ketika pelatihan selesai, melainkan ketika kemampuan dapat digunakan dalam situasi nyata dan anggota memperoleh ruang untuk menentukan atau menjalankan tindakan.

Dengan demikian, kemandirian dalam penelitian ini lebih tepat dipahami sebagai proses bertingkat dan multidimensional. Temuan tidak mendukung klaim bahwa komunikasi inklusif atau pelatihan secara langsung menyebabkan kemandirian. Data hanya menunjukkan bahwa komunikasi yang lebih aksesibel, kesempatan berpartisipasi, penggunaan keterampilan, serta pemberian tanggung jawab dapat membentuk kondisi yang mendukung perkembangan menuju kemandirian dengan bentuk dan kecepatan yang berbeda antar anggota.

5. Model Kontekstual Komunikasi Inklusif dalam Pemberdayaan

Berdasarkan keterkaitan antar tema, penelitian ini menghasilkan pola empiris kontekstual berikut:



Gambar 1. Model Kontekstual Komunikasi Inklusif dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas

Pola tersebut merupakan konstruksi analitis yang dibangun dari keterulangan hubungan dalam wawancara, observasi, dan dokumentasi. Arah panah menunjukkan urutan proses yang paling sering tampak dalam data, bukan hubungan sebab-akibat atau tahapan yang harus dialami seluruh anggota.

Temuan menunjukkan adanya variasi pengalaman. Sebagian anggota mengalami peningkatan akses dan partisipasi tanpa memperoleh peran pengelolaan, sedangkan anggota lain mulai menggunakan keterampilan secara lebih mandiri atau memperoleh tanggung jawab organisasional setelah proses belajar dan pendampingan. Karena itu, model ini lebih tepat dipahami sebagai peta proses kontekstual Roemah Difabel Indonesia, bukan sebagai model universal pemberdayaan disabilitas.

Secara konseptual, model ini menempatkan komunikasi inklusif sebagai penghubung antara akses komunikasi, partisipasi, penggunaan kapasitas, dan perubahan peran. Nilai analitisnya terletak pada proposisi bahwa komunikasi yang adaptif perlu diikuti ruang partisipasi, sedangkan pengembangan kapasitas memperoleh makna pemberdayaan ketika anggota memiliki kesempatan menggunakan kemampuan dan menjalankan tanggung jawab yang semakin bermakna.

6. Implikasi dan Keterbatasan Penelitian

Temuan menunjukkan bahwa evaluasi program pemberdayaan perlu bergerak melampaui jumlah pelatihan dan jumlah peserta. Pada level operasional, organisasi komunitas dapat menggunakan beberapa indikator: akses informasi, misalnya berapa anggota yang menerima dan memahami jadwal atau instruksi tanpa hambatan yang tidak tertangani; partisipasi, misalnya frekuensi anggota bertanya, menyampaikan pendapat, atau terlibat dalam diskusi; penggunaan kapasitas, misalnya jumlah anggota yang mempraktikkan keterampilan dalam bazar, kegiatan publik, produksi, atau aktivitas digital; serta perubahan peran, misalnya jumlah anggota yang memperoleh tanggung jawab rutin sebagai pendamping, fasilitator, pengelola aktivitas, atau representasi komunitas.

Indikator tersebut sebaiknya tidak digunakan sebagai target angka yang seragam bagi seluruh anggota. Variasi kebutuhan komunikasi dan dukungan mengharuskan evaluasi juga memperhatikan perubahan individual. Anggota yang sebelumnya membutuhkan pendampingan penuh tetapi kemudian mampu menjalankan sebagian aktivitas dengan bantuan terbatas dapat menunjukkan perkembangan yang substantif meskipun belum menjalankan peran formal.

Bagi Roemah Difabel, data juga menunjukkan dua area penguatan. Pertama, kapasitas pendamping dalam ragam komunikasi perlu terus ditingkatkan, termasuk kemampuan bahasa isyarat dan strategi penyederhanaan komunikasi. Kedua, mekanisme dokumentasi perkembangan anggota dapat dibuat lebih sistematis agar perubahan dari peserta, pengguna keterampilan, hingga pemegang tanggung jawab dapat dilacak dari waktu ke waktu. F2 dan F3 secara eksplisit masih menyebut keterbatasan tenaga pendamping, fasilitas, dan kemampuan komunikasi tertentu sebagai tantangan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, desain studi kasus intrinsik berfokus pada satu komunitas sehingga pola yang dihasilkan bersifat kontekstual dan tidak dimaksudkan untuk generalisasi statistik. Kedua, komposisi informan menempatkan pengelola, pengurus, mentor, dan anggota dalam satu kasus, tetapi jumlah anggota penyandang disabilitas yang diwawancarai secara mendalam masih terbatas sehingga variasi pengalaman berdasarkan kebutuhan komunikasi belum seluruhnya terwakili.

Ketiga, observasi dilakukan dalam periode penelitian yang terbatas dan tidak memungkinkan seluruh jenis kegiatan, interaksi, atau perubahan peran diamati secara longitudinal. Karena itu, sejumlah perkembangan peran juga diperoleh melalui rekonstruksi pengalaman informan dan dokumentasi organisasi. Keempat, wawancara mengenai manfaat program dan perubahan diri memiliki kemungkinan bias sosial-desirabilitas, terutama karena sebagian informan memiliki hubungan keterlibatan jangka panjang dengan komunitas. Triangulasi sumber dan teknik digunakan untuk mengurangi risiko tersebut, tetapi tidak dapat menghilangkannya sepenuhnya.

Kelima, dokumentasi digital seperti media sosial, foto, dan publikasi organisasi bersifat selektif karena cenderung merekam kegiatan yang dianggap layak dipublikasikan. Dokumentasi tersebut karena itu digunakan sebagai bukti pendukung dan pemeriksa silang, bukan sebagai representasi lengkap kehidupan komunitas. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan desain longitudinal, melibatkan lebih banyak anggota dengan ragam kebutuhan komunikasi, dan membandingkan beberapa organisasi komunitas untuk menguji transferabilitas pola yang ditemukan.

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi inklusif menjadi bagian penting dalam proses pemberdayaan penyandang disabilitas di Roemah Difabel Indonesia. Praktiknya dilakukan melalui penyederhanaan bahasa, pengulangan informasi, penggunaan tulisan, visual, demonstrasi langsung, bahasa isyarat, media digital, serta pendampingan yang disesuaikan dengan kebutuhan komunikasi anggota. Penyesuaian tersebut membantu anggota memahami informasi, memberikan respons, berpartisipasi dalam kegiatan, dan menggunakan keterampilan yang dipelajari.

Partisipasi yang berkembang tidak berhenti pada kehadiran dalam kegiatan. Pada sebagian anggota, keterlibatan berlanjut menjadi penggunaan keterampilan, pengambilan tanggung jawab, keterlibatan dalam aktivitas produktif, pengelolaan media, bantuan dalam proses pembelajaran, maupun representasi komunitas. Perubahan tersebut berlangsung dengan bentuk dan tingkat yang berbeda, serta tetap dapat disertai kebutuhan terhadap dukungan dan pendampingan.

Berdasarkan keseluruhan temuan, penelitian ini mengidentifikasi pola kontekstual berupa adaptasi komunikasi, akses dan partisipasi, penggunaan kapasitas, tanggung jawab dan perubahan peran, serta proses menuju kemandirian. Pola ini merupakan interpretasi analitis terhadap dinamika satu kasus dan tidak dimaksudkan sebagai hubungan kausal atau tahapan universal. Secara konseptual, temuan memperlihatkan bahwa komunikasi inklusif dapat dipahami sebagai penghubung antara akses komunikasi, partisipasi, dan perubahan peran dalam pemberdayaan berbasis komunitas.

Secara praktis, evaluasi program pemberdayaan perlu memperhatikan tidak hanya jumlah kegiatan dan peserta, tetapi juga keterjangkauan informasi, keterlibatan

anggota, penggunaan keterampilan, dan berkembangnya tanggung jawab. Karena penelitian ini berfokus pada satu komunitas dengan jumlah wawancara lengkap yang terbatas serta observasi yang belum longitudinal, penelitian selanjutnya perlu melibatkan konteks organisasi yang lebih beragam dan menggunakan desain komparatif atau longitudinal untuk menguji transferabilitas pola yang ditemukan.

Daftar Pustaka

- Abdillah, A., Widianingsih, I., Buchari, Ahmad, R., & Nurasa, H. (2025). Inclusive resilience in Indonesia. Case of disability anticipation within inclusive development. *Discover Social Science and Health*, 5(40).
- Balandin, S., & Duchan, J. (2007). Communication: Access to inclusion. *Journal of Intellectual and Developmental Disability*, 32(4), 230–232. <https://doi.org/10.1080/13668250701693902>
- Bartram, T., & Cavanagh, J. (2019). Re-thinking vocational education and training: creating opportunities for workers with disability in open employment. *Journal of Vocational Education and Training*, 71(3), 339–349. <https://doi.org/10.1080/13636820.2019.1638168>
- Bigby, C., & Wiesel, I. (2011). Encounter as a dimension of social inclusion for people with intellectual disability: Beyond and between community presence and participation. *Journal of Intellectual and Developmental Disability*, 36(4), 263–267. <https://doi.org/10.3109/13668250.2011.619166>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.
- Daroini, S., Jumriyah, & Rosyidah, I. (2022). Strengthening Social Inclusion and Empowerment for People with Disabilities through the Malang Inclusion Forum. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 5(1), 7410–7418. <https://doi.org/10.33258/birci.v5i1.4475>
- Dushkova, D., & Ivlieva, O. (2024). Empowering Communities to Act for a Change: A Review of the Community Empowerment Programs towards Sustainability and Resilience. *Sustainability (Switzerland)*, 16(19), 8700. <https://doi.org/10.3390/su16198700>
- Langmann, S., Bezemer, P. J., & Pick, D. (2024). Local community capacity building: exploring non-governmental organizations approaches in Tamil Nadu. *Community Development Journal*, 59(3), 438–456. <https://doi.org/10.1093/cdj/bsad009>
- Nikkhah, H. A., & Redzuan, M. Bin. (2010). The Role of NGOs in Promoting Empowerment for Sustainable Community Development. *Journal of Human Ecology*, 30(2), 85–92. <https://doi.org/10.1080/09709274.2010.11906276>

- Center for Inclusive Policy, & Inclusion Advisory Group, C. Global. (2025). Inclusive social protection for persons with disabilities in Indonesia: A rapid review of evidence. In *Australian Government* (Number June).
- Pudrianisa, S. L. G., Astari, D. W., & Agustina, D. P. (2024). Inclusive Disability Empowerment Utilization of Digital Applications in Accessing Information for People With Disabilities. *CHANNEL Jurnal Komunikasi*, 12(2), 143–151. <https://doi.org/10.12928/channel.v12i2.996>
- Rahman, A., Wasistiono, S., Riyani, O., & Tahir, I. (2023). Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(2), 1461–1471. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i2.1492>
- Simanjuntak, D., & Sunarja, D. (2023). Organizational Communication Based on Local Wisdom by the Tourism Awareness Group in the Management of Cireundeu Traditional Village. *Society*, 11(2), 814–834. <https://doi.org/10.33019/society.v11i2.575>
- Stafford, L., Novacevski, M., Pretorius, R., & Rogers, P. (2024). The makings of disability-inclusive sustainable communities: Perspectives from Australia. *Urban Governance*, 4(2), 113–121. <https://doi.org/10.1016/j.ugj.2024.03.004>
- Surwanti, A., & Kurnia Puji Rahayu, M. (2025). Empowerment Programs and Policies For People With Disabilities In Indonesia-Australia. *International Journal of Science and Environment (IJSE)*, 5(4), 163–170. <https://doi.org/10.51601/ijse.v5i4.264>
- Thorn, S. H., Pittman, A., Myers, R. E., & Slaughter, C. (2009). Increasing community integration and inclusion for people with intellectual disabilities. *Research in Developmental Disabilities*, 30(5), 891–901. <https://doi.org/10.1016/j.ridd.2009.01.001>
- Tomczak, M. T., Szulc, J. M., & Szczerska, M. (2021). Inclusive communication model supporting the employment cycle of individuals with autism spectrum disorders. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(9). <https://doi.org/10.3390/ijerph18094696>
- unicef. (2023). *Landscape Analysis on Children with Disabilities in Indonesia Embracing Diversity and Inclusion for All: Landscape Analysis on Children with Disabilities in Indonesia Landscape Analysis on Children with Disabilities in Indonesia*. 1. <https://www.unicef.org/indonesia/disabilities/reports/landscape-analysis-children-disabilities-indonesia>
- Verdonschot, M. M. L., de Witte, L. P., Reichrath, E., Buntinx, W. H. E., & Curfs, L. M. G. (2009). Community participation of people with an intellectual disability: A review of empirical findings. *Journal of Intellectual Disability Research*, 53(4), 303–318. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2788.2008.01144.x>

<https://doi.org/10.62491/jsm.v3i1.2026.115>

Widagdo, A. K., Rahmawati, R., Purnomo, R. A., Jaafar, N. I., & Markhumah, U. (2025). Advancing disability inclusion through social and digital entrepreneurship in ASEAN. *International Journal of Innovative Research and Scientific Studies*, 8(3), 1139–1152. <https://doi.org/10.53894/ijirss.v8i3.6764>